



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RENCANA KERJA
TAHUN 2026



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

JL.PEMUDA KM.3 REMBANG TELP/FAX (0295) 691349
REMBANG - 59219

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga rencana kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam periode tahunan. Selain itu Rencana Kerja 2026 ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 1 (satu) Tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 dan 2024 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Dengan penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kami berharap dapat bermanfaat dan menjadi acuan didalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Rembang, 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang



Drs. DWI MARTOPO

Pembina Utama Muda

NIP. 19670313 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.2. Landasan Hukum.....	I.2
1.3. Maksud dan tujuan.....	I.4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I.5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	II.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II.26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II.26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III.1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III.2
3.3. Program dan Kegiatan	III.5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV.1
BAB V PENUTUP	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Rembang	II.3
Tabel 2.2. Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2024.....	II.15
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	II.25
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.....	II.28
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029	III.3
Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	IV.3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasia Pembangunan daerah Daerh Tata cara evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, untuk kemudian dituangkan kedalam Renstra PD tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, Renstra PD harus dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja PD disusun setiap tahun dengan tetap berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Renja-PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga akhir tahun 2025 semester I, pemasalahan dan tantangan berkaitan dengan perindustrian dan tenaga kerja.

Renja-PD merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renja- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan implementasi perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam program dan penganggaran yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian dokumen rencana kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2026 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 6 Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang

- Tahun 2025 - 2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2029;
 20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
 21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 000.7/5031/2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang selama satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Ranwal Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2026
- 2) Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3) Tersedianya pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2026, meliputi :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui capaian realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sasaran untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

Tugas, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi;

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.

3. Melaksanakan kebijakan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja
5. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Dinas
6. Mengendalikan penyelenggaraan tugas UPTD
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2025 dan perkiraan realisasi pencapaian target renstra tahun 2024;

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Rembang

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)				
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA													
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2	07	01												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	72,00 Angka	61,31 Angka	72,00 Angka	61,31 Angka	85,15 %	73Angka	NA	0		
				IKM	82,56 Angka	96,73 Angka	82,56 Angka	96,73 Angka	117,16 %	83,69 Angka				
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	92 %	92 %	92 %	92 %	100%	93%	80%	86,95%	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	7	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	7	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubaha RKA-SKPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	8 Laporan	66,67%
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	97,00 %	96,00 %	97,00 %	96,00 %	98,97%	96,5 %	75%	77,32%
2	07	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	50 Orang	45 Orang	50 Orang	45 Orang	90%	50 Orang	65 Orang	130%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)			
		Tunjangan ASN											
2	07	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	8 Dokumen	66,67%	
2	07	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Lapoarn	1000%	1 Lapoarn	-	-	
2	07	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	12Lapoarn	8 Lapoarn	66,67%	
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	95%	95%	95%	100 %	95%	75%	78,95%
2	07	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%
2	7	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100%	
2	7	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
2	7	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penialain Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1 Orang	50 %	2 Orang	-	-	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	40 Paket	80%	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	30 Paket	-	-	30 Paket	30 Paket	76,67%	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)				
	Kantor	Kantor yang Disediakan												
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	17 Paket	85%
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	100%	12 Paket	10 Paket	76,92%
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	8 Paket	66,67%
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	-	12 Paket	-	-	12 Paket	-	-
2	7	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	9 Paket	75%
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	6 Laporan	50%
2	7	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana Aparatur	95%	20%	95%	20%	21,05 %	95%	-	-
2	7	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	-	1 Unit	-	-
2	07	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	5 Unit	1 Unit	20%	5 Unit	-	-
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%
2	07	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	8 Laporan	66,67%
2	07	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	8 Laporan	66,67%
2	07	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	-	12 Laporan	8 Laporan	66,67%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
2 07 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	8 Laporan	66,67%
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%
2 07 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	9 Unit	81,82%
2 7 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	9 Unit	81,82%
2 07 01 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	4 Unit	-	-	4 Unit	-	-
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik	50%	50 %	50%	50 %	100 %	50%	-	-
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase peningkatan database tenaga Kerja	5%	10 %	5%	10 %	200%	5%	-	-
2 07 02 2.01 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2 07 02 2.01 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	1 Orang	5 orang	1 Orang	5 orang	500 %	1 Orang	-	-
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	60%	10%	60%	10%	16,67%	65%	50%	76,92%
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan	45	34	45	34	75,56%	50 paket	9 paket	20%
		Jumlah unit kompetensi	799 Unit	34	799 Unit	34	4,25%	860 Unit	9 Unit	1,12%
2 07 0 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	264	332 Orang	264	332 Orang	125,76%	280 Orang	144 Orang	54,54%
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 Lembaga	30 Lembaga	25 Lembaga	30 Lembaga	120%	30 Lembaga	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
2 07 03 2.02 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8 Lembaga	10 Lembaga	8 Lembaga	10 Lembaga	125%	11 Lembaga	-	-
2 7 3 2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki Perizinan	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	5 Lembaga	-	-
2 7 3 2.03 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	5 Perizinan	5 Perizinan	5 Perizinan	60%	5 Perizinan	-	-
2 7 3 2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	-	-
2 7 3 2.04 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100%	5 Perusahaan	-	-
2 7 3 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20 %	-	20 %	-	-	30%	-	-
2 7 3 2.05 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	45%	89,50%	45%	89,50%	198,89%	50%	30%	66,67%
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 07 04 2.01 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	3 Orang	5 Orang	3 Orang	5 Orang	166,67%	3 Orang	-	-
2 3 4 2.01 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3000 Orang	6164 Orang	3000 Orang	6164 Orang	205,47%	3000 Orang	-	-
2 07 04 2.01 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang	7379 Orang	30 Orang	7379 Orang	24.596,67%	30 Orang	30 Orang	100%
2 07 04 2.01 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Katenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 Orang	140 Orang	15 Orang	140 Orang	933,33%	15 Orang	-	-
2 7 4 2.01 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	250 Orang	15 Orang	250 Orang	1.666,67,67%	15 Orang	5 Orang	33,33 %
2 7 4 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1	Jumlah LPTKS	15 Lembaga	-	15 Lembaga	-	-	15 Lembaga	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)	
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2	7	4	2.02	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	-	1 Lembaga	-	-
2	7	4	2.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	-	1 Lembaga	-	-
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	10 Informasi	10 Informasi	100%	15 Informasi	-
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20 Orang	7379 Orang	36.895,00%	20 Orang	-
2	7	4	2.03	3	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1000 Orang	-	1000 Orang	-	1500 Orang
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi	20 Orang	155	20 Orang	155	-
2	07	04	2.04	1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	-	20 Orang	-	20 Orang
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	% perusahaan yang taat aturan	65%	71,43%	65%	71,43%	95,97%
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan	50 Badan usaha	225 Badan usaha	50 Badan usaha	225 Badan usaha	450%
2	07	05	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP	15 Perusahaan	-	15 Perusahaan	-	15 Perusahaan
											27 Perusahaan
											180 %

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)		
		Online										
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	-	5 Perusahaan	-	-	
2	07	05	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%	50 Perusahaan	25 Perusahaan	50%
2	07	05	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	5 Perkara	100%	50 Perkara	25 Perkara	50%
2	07	05	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	6 Perkara	-	6 Perkara	-	6 Perkara	-
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	-	-
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Jumlah Tenaga Kerja yang terfasilitasi kesejahteraannya	14.500 Orang	-	14.500 Orang	-	14.500 Orang	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)	
		Kesejahteraan Pekerja									
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						0,5			
3 31 02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Usaha Industri	3,50%	4,46%	3,50%	4,46%	127,43%	4%	2,1%	60%
3 31 02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Industri yang Didampingi usahanya	250 Usaha	200 Usaha	250 Usaha	200 Usaha	80%	250 Usaha	51 Usaha	20,4%
3 31 02	2.01	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-
3 31 02	2.01	2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-
3 31 02	2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3 31 02	2.01	4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-
3 31 02	2.01	5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
3 31 02	2.01	6 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-
3 31 03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	% usaha industri yang memiliki ijin usaha	20%	100%	20%	100%	500%	25%	100%	500%
3 31 03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (UIU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Sesuai SOP	61 Unit	3 Unit	61 Unit	3 Unit	4,92%	66 Unit	3 Unit	4,92%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)				
	Kabupaten/Kota													
3	31	03	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	50 Dokumen	-	50 Dokumen	-	55 Dokumen	-	-	
3	31	03	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor peindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Perizinan Berusaha industri dengan skala Usaha Industri Kecil dan industri menengah yang berlokasi disatu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat	25 Dokumen	-	25 Dokumen	-	30 Dokumen	1 Dokumen	4 %	
3	31	03	2.01	4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	umlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	%usaha industri yang masuk database	60%	2,9%	60%	2,9%	4,83%	65%	3,1%	5,16%
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Database Industri	1 Database	1 Database	1 Database	100%	1 Database	1 Database	100%	
2					Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)				
		Dengan Baik												
3	31	04	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	31	04	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	31	04	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	-	-

Pada tabel 2.1 dapat diuraikan capaian target/ program kegiatan sebagai berikut :

- a. Capaian program dan kegiatan antara target dan realisasi pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang pada Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Tahun 2024 dari nilai ditargetkan 72 terealisasi sebesar 61,31 sehingga pencapaiannya 85,15 % dan nilai IKM dari target 82,56 terealisasi sebesar 96,73 sehingga pencapaian 117,16%
- b. Capaian Program dan Kegiatan pada Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
 1. Program perencanaan dan Pembangunan industri untuk pertumbuhan usaha industri tahun 2024 ditargetkan 3,50% terealisasi 4,46% sehingga capaian kinerjanya sebesar 127,43%. Program tersebut didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan sumber daya industri; Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat. Sedangkan tahun 2025 sampai dengan triwulan III capaian kinerjanya 52,50 % dari target 4,0% dan realisasi 2,1 %. Capaian kinerja tahun 2025 TW 3 belum memenuhi target dikarenakan masih kurangnya pemanfaatan teknologi industri oleh IKM dan kurangnya dukungan anggaran . Sehingga perlu menjalin kemitraan dengan stakeholder terkait dengan pembinaan IKM
 2. Program pengendalian ijin usaha industri Kabupaten/Kota, persentase usaha industri yang memiliki ijin usaha tahun 2024 dengan indikator % usaha industri yang memiliki ijin usaha yang ditargetkan 20% dan terealisasi 100% sehingga pencapaian sebesar 500%. Program tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor Perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan OSS RBA. Tahun 2025 TW 3 realisasi 100 % dengan target 25 %. Capaian kinerja indikator pada program ini sangat tinggi disebabkan mayoritas usaha industri yang masuk dalam data sudah memiliki ijin usaha (NIB).
- c. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator persentase industri yang masuk

data base tahun 2024 ditargetkan sebesar 60% terealisasi sebesar 2,9%, sehingga pencapaian sebesar 4,83%. Sedangkan tahun 2025 TW 3 target 65 % realisasinya 3,1 % sehingga capaian kinerjanya 4,77 %. Program tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pemantauan dan evaluasi kepatuhan Perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Capaian kinerja pada program ini masih rendah disebabkan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha industri kecil untuk mempunyai akun SIINas sehingga perlu sosialisasi, pembinaan dan pendampingan .

d. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja:

- Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator cakupan laporan database tenaga kerja yang dikelola dengan baik tahun 2024 capaian kinerjanya 100 % dengan target 50% dan terealisasi 50%. Sedangkan tahun 2025 capaian kinerjanya masih rendah disebabkan keterbatasan SDM penyusun dan perlu koordinasi secara intens terkait data.
- Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2024 dengan indikator % calon pencari kerja yang ditempatkan target 45% realisasi 89,50 % sehingga capaian kinerjanya 198,88 %. Tahun 2025 TW 3 realisasi baru 30% dari target 50 %.

e. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial dengan indikator persentase Perusahaan yang taat aturan tahun 2024 ditargetkan sebesar 65% terealisasi sebesar 71,43%, sehingga pencapaian sebesar 109,89%. Sedangkan tahun 2025 TW 3 target 72% dan realisasi 72 % sehingga capaian kinerjanya sudah 100%.

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					8.427.096.932	8.254.860.802	97,96%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.521.429.632	7.352.896.502	97,76%
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.521.429.632	7.352.896.502	97,76%
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	72,00 Angka	61,31 Angka	85,15 %	5.633.429.632	5.473.529.234	97,76%
		IKM	82,56 Angka	96,73 Angka	117,16 %			
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	92 %	92 %	100%	1.500.000	1.464.000	97,60%
2 7 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	500.000	489.000	97,80%
2 7 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	500.000	475.000	95,00%
2 7 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubaha RKA-SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-
2 7 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100 %	-	-	-
2 7 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	500.000	500.000	100%
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	97,00 %	96,00 %	98,97%	5.167.430.105	5.035.932.682	97,46%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
2 07 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	45 Orang	90%	5.075.480.105	4.944.010.682	97,41
2 07 01 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 Dokumen	100%	91.450.000	91.440.000	99,99
2 07 01 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Lapoam	1000%	500.000	482.000	96,40
2 07 01 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
2 07 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	95%	95%	100 %	-	-	-
2 07 01 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-	-	-
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	125.000	124.200	99,36%
2 7 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	100 %	-	-	-
2 7 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4Dokumen	4 Dokumen	100%	125.000	124.200	99,36%
2 7 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	-	-
2 7 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1 Orang	50 %	-	-	-
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	100%	60.529.402	57.536.000	95,01%
2 7 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	100%	2.500.000	2.495.000	99,80%
2 7 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	-	-	-	-	-
2 7 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100%	6.960.000	6.957.000	99,96%
2 7 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	100%	8.100.000	8.096.000	99,95%
2 7 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	12.179.402	12.179.000	99,97%
2 7 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
2 7 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	16.770.000	16.751.000	99,87%
2 7 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %	-	-	-
2 7 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur	95%	20%	21,05 %	-	-	-
2 7 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-
2 07 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	20%	3.000.000	2.252.000	75,05%
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	377.185.125	356.561.052	94,53%
2 07 01 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
2 07 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	88.200.000	76.166.427	86,36%
2 07 01 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	-
2 07 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	288.985.125	280.394.625	97,03%
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	23.660.000	22.035.500	93,13%
2 07 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	11 Unit	100%	15.070.000	13.445.500	89,22%
2 7 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	100%	8.590.000	8.590.000	100%
2 07 01 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	-	-	-	-
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik	50%	50 %	100 %	-	-	-
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase peningkatan database tenaga kerja	5%	10 %	200%	-	-	-
2 07 02 2.01 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2 07 02 2.01 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 Orang	5 orang	500 %	-	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	60%	10%	16,67%	-	-	-
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan	45	34	75,56%	-	-	-
		Jumlah unit kompetensi	799 Unit	34	4,25%			-
2 07 0 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	264	332 Orang	125,76%	-	-	-
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	25 Lembaga	30 Lembaga	120%	-	-	-
2 07 03 2.02 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8 Lembaga	10 Lembaga	125%	-	-	-
2 7 3 2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki perizinan	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	-	-	-
2 7 3 2..03 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	5 Perizinan	60%	-	-	-
2 7 3 2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan Produktivitas	5 Unit	5 Unit	100%	-	-	-
2 7 3 2.04 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100%	-	-	-
2 7 3 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20 %	-	-	-	-	-
2 7 3 2.05 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan	45%	89,50%	198,89%	1.513.000.000	1.501.997.068	99,27%
2 07 04 2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1.313.000.000	1.303.803,068	99,30%
2 07 04 2.01 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	3 Orang	5 Orang	166,67%	100.000.000	98.546.000	98,54%
2 3 4 2.01 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3000 Orang	6164 Orang	205,47%	3.000.000	3.000.000	100%
2 07 04 2.01 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang	7379 Orang	24.596,67%	300.000.000	298.297.268	99,43%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
2 07 04 2.01 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Katenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Layanan Disabilitas yang difasilitasi	15 Orang	140 Orang	933,33%	320.000.000	316.816.800	99,00%
2 7 4 2.01 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	250 Orang	1.666,67,67%	590.000.000	587.143.000	99,52%
2 7 4 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS	15 Lembaga	-	-	-	-	-
2 7 4 2.02 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	-	-	-	-	-
2 7 4 2.02 2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	-	-	-	-	-
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	10 Informasi	10 Informasi	100%	200.000.000	198.194.000	99,10%
2	1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	-	-	-	-	-
2 7 4 2.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20 Orang	7379 Orang	36.895,00%	200.000.000	198.194.000	99,10%
2 7 4 2.03 3	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1000 Orang	-	-	-	-	-
2 07 04 2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi	20 Orang	155	-	-	-	-
2 07 04 2.04 1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	-	-	-	-	-
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	% perusahaan yang taat aturan	65%	71,43%	95,97%	375.000.000	371.284.000	99,00%
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan	50 Badan usaha	225 Badan usaha	450%	100.000.000	98.846.000	98,84%
2 07 05 2.01 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	-	-	-	-	-
2 7 5 2.01 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	-	-	-	-	-
2 07 05 2.01 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah,	2 Laporan	2 Laporan	100%	100.000.000	98.846.000	98,84%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
	Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan						
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%	275.000.000	272.438.000	99,07%
2 07 05 2.02 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	50 Perkara	100%	200.000.000	198.915.000	99,46%
2 07 05 2.02 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 Perkara	-	-	-	-	-
2 7 5 2.02 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	-	-	-	-
2 7 5 2.02 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	75.000.000	73.523.000	98,03%
2 7 5 2.02 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	13.800 Orang	-	-	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					905.667.300	905.401.300	99,97%
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					905.667.300	905.401.300	99,97%
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Usaha Industri	3,50%	4,46%	127,42%	447.814.600	447.668.600	99,97%
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah usaha industri Yang Didampingi	250 Usaha	200 Usaha	80%	447.814.600	447.668.600	99,97%
3 31 02 2.01 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
3 31 02 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	-	-	-	-	-
3 31 02 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	278.925.900	278.886.900	99,99%
3 31 02 2.01 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	-	-	-	-	-
3 31 02 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	198.888.700	198.781.700	99,95%
3 31 02 2.01 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	-	-	-	-	-
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	% usaha industri yang memiliki ijin usaha	20%	100%	500%	229.240.700	229.215.700	99,99%
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (UIU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Sesuai SOP	61 Unit	3 Unit	4,91%	229.240.700	229.215.700	99,99%
3 31 03 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	50 Dokumen	-	-	-	-	-
3 31 03 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Dokumen	-	-	-	-	-
3 31 03 2.01 4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	229.240.700	229.215.700	99,99%
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% usaha industri yang masuk database	60%	2,90%	4,83%	198.612.000	198.517.000	99,95%
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Database Industri	1 Database	1 Database	100%	198.612.000	198.517.000	99,95%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)	
			5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100	
2		Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola Dengan Baik	1 Laporan	-	-	-	-	-	
3	31 04 2.01 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	-	-	-	-	
3	31 04 2.01 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	-	-	-	-	
3	31 04 2.01 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	200%	198.612.000	198.517.000	99,95%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja tahun anggaran 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masih terdapat program dan kegiatan yang belum tercapai sesuai yang ditargetkan, masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu;

1. Sekretariat Dinperinnaker pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan capaian kegiatan antara target dan realisasi tercapai, akan tetapi dalam program tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya yaitu terbatasnya anggaran APBD yang ada pada Dinas, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang memadai serta SDM yang masih sangat kurang dari kebutuhan Dinas.

Diharapkan tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menambah anggaran kegiatan melalui APBD, sarana dan prasarana dapat direalisasi sesuai kebutuhan serta SDM untuk dilakukan penambahan untuk mendukung kinerja Dinas.

2. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam bidang tersebut terdapat beberapa Program diantaranya, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja dan program penempatan tenaga kerja, secara keseluruhan pada Bidang tersebut realisasi dapat tercapai sesuai target, akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya yaitu masih kurangnya dukungan dari Pemerintah melalui anggaran dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan pada bidang, kekurangan SDM yang mengampu kegiatan, sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, dalam bidang tersebut hanya terdapat satu Program yaitu hubungan industrial, % Perusahaan yang taat aturan dari target 65% tercapai sebesar 71,43% sehingga pencapaian sebesar 109,89%. Tetapi masih perlu dukungan pemerintah dalam meningkatkan ketaatan perusahaan pada aturan dan pembinaan hubungan industrial yang baik dan harmonis.
4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dalam bidang tersebut terdapat program perencanaan dan Pembangunan industri,

pertumbuhan usaha industri dari target 3,50% terealisasi 4,46% sehingga capaian kinerjanya sebesar 127,43% dengan kategori kinerjanya sangat tinggi. Tetapi masih peningkatan kemitraan dengan stakeholder untuk pembinaan IKM.

Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota, dalam program tersebut % usaha industri yang memiliki ijin usaha ditargetkan sebesar 20% tercapai sebesar 100%, sehingga pencapaian sebesar 500% dengan kategori sangat tinggi.

5. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri, dalam bidang tersebut terdapat Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang mempunyai indikator % usaha industri yang masuk dalam database, indikator tersebut tercapai 2,9% dari target sebesar 60%.

- Penyebab tidak tercapainya target karena program SIINas baru dikenalkan pada tahun 2022, belum ada anggaran untuk kegiatan untuk dapat sosialisai kepada para pelaku usaha industri kecil dan menengah.
- Kendala yang dihadapi karena Sebagian besar para Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah, masih kesulitan dalam mengakses Sistem Informasi Industri dalam mendapatkan akun SIINas masih kurangnya sosialisasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) kurangnya anggaran untuk kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Sistem Industri Nasional (SIINas) bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan menengah.
- Tindaklanjut perumusan program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan yaitu sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) kepada pelaku Usaha Industri dan OPD terkait digencarkan membuka Klinik SIINas, mengajukan anggaran yang memadai melalui APBD, dll.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase tingkat pengangguran terbuka	4,6%	4,5%	4,3%	4%	2,60%	2,84%	4,3%	4%	Tujuan
2	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	6,59%	5,61%	2,0%	2,5%	Tujuan
3	Persentase pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal	7%	10%	12%	15%	-1	0,14	12%	15%	sasaran
4	kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	3,18 triliyun	3.2 triliyun	3,23 triliyun	3,25 triliyun	3,544 triliyun	3,743 triliyun	3,23 triliyun	3,25 triliyun	sasaran

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mengampu 2 (dua) urusan yakni urusan Ketenagakerjaan dan urusan Perindustrian. Berikut isu-isu penting dalam penyelenggaraan fungsi Dinperinnaker antara lain:

1. Kondisi kantor Dinperinnaker yang rusak, baik kantor dalam rangka pengadministrasian maupun untuk pelayanan dan pelatihan tenaga kerja, oleh sebab itu dalam pemberian pelayanan dan tempat pelatihan belum layak dan nyaman bagi pencari kerja;
2. Perlu penguatan link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri, serta optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK);
3. Perlu peningkatan konsolidasi peran para mediator hubungan industrial agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja;
4. Masih adanya kesenjangan keterampilan tenaga kerja;
5. Terjadinya bonus demografi dengan dominasi generasi muda di pasar kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada;
6. Kurangnya bahan baku yang cukup untuk mendorong industri agar bersaing dengan daerah lain;
7. Isu lingkungan hidup yang semakin hari akan semakin sulit dikontrol yakni pengelolaan limbah industri;
8. Perlunya pembinaan dan pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM) agar siap bersaing serta perlu menyiapkan mekanisme kerjasama usaha antara IKM dan Industri sedang maupun besar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan

rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat disajikan dalam table 2.4

**Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				9.500.314.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				9.023.992.284	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.600.314.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.529.192.284	
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.600.314.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.529.192.284	
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah</i>	100%	6.640.314.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah</i>	100%	7.337.592.284	
2 0 7 1 1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	94	644.000.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	94	97.500.000	
2 7 1 2.0 1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah</i>	3	616.500.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah</i>	3	70.000.000	
2 7 1 2.0 1 2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun</i>	2	5.000.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun</i>	2	5.000.000	
2 7 1 2.0 1 3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2	5.000.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2	5.000.000	
2 7 1 2.0 1 6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3	5.000.000	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3	5.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 7 1 2.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12.500.000	
2 7 1 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	97	5.338.398.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	97	6.843.242.284	
2 0 0 2.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	5.220.448.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	6.725.292.284	
2 0 0 2.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	115.950.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	115.950.000	
2 0 0 2.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.000.000	
2 0 0 2.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	12	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	12	1.000.000	
2 7 1 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	95	1.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	95	1.500.000	
2 0 0 2.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.500.000	
2 7 1 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100	7.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100	7.000.000	
2 7 1 2.0 5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Rembang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	2.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Rembang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	2.000.000	
2 7 1 2.0 5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	2.000.000	
2 7 1 2.0 5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	2.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	2.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2712059	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Rembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	1.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Rembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	1.000.000	
271206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	165.266.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	166.550.000	
2712061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	6.284.000	
2712062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	49.280.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	49.280.000	
2712063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	10.000.000	
2712064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	11.486.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	11.486.000	
2712065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	10.000.000	
2712066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	2.000.000	
2712067	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	16.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	16.500.000	
2712069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	60.000.000	
2712060	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1.000.000	
271207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur	95	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur	95	50.000.000	
2712075	Pengadaan Mebel	Kab. Rembang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Rembang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10.000.000	
2712076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	40.000.000	
27120711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Rembang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Rembang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1		
27120	Penyediaan Jasa Penunjang		Persentase pemenuhan pelayanan	100	389.150.000	Penyediaan Jasa Penunjang		Persentase pemenuhan pelayanan	100	126.800.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8			Urusan Pemerintahan Daerah		administrasi perkantoran		00	
20718	2.01	Kab. Rembang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.500.000	
20718	2.02	Kab. Rembang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	117.300.000	
20718	2.03	Kab. Rembang	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	8.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	8.000.000	
20718	2.04	Kab. Rembang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	259.650.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	0	
2719	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	45.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara dengan baik	100	45.000.000	
20719	2.01	Kab. Rembang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Rembang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	15.000.000	
20719	2.06	Kab. Rembang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	15.000.000	
20719	2.09	Kab. Rembang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Rembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15.000.000	
272			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	60,50	50.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Implementasi Rencana Tenaga Kerja	60,50	5.000.000	
272	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5	50.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	5	5.000.000	
20721	2.01	Kab.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	2	25.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2	2.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Rembang</i>					<i>Rembang</i>				
2 7 0 2.0 3 2 1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Rembang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	1	25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Rembang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	1	2.500.000	
2 7 3 2.0 1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,77	1.500.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,77	62.000.000	
2 7 3 2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah paket pelatihan	50	1.250.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah paket pelatihan	50	62.000.000	
			Jumlah unit kompetensi	-				Jumlah unit kompetensi	-		
2 0 0 2.0 1 7 3 1	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan KlasterKompetensi</i>	<i>Kab. Rembang</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	296	1.250.000.000	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan KlasterKompetensi</i>	<i>Kab. Rembang</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	296	62.000.000	
2 7 3 2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	30	100.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	30	0	
2 0 0 2.0 1 7 3 2	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Kab. Rembang</i>	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	14 lembaga	100.000.000	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Kab. Rembang</i>	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	14 lembaga	0	
2 7 3 2.0 3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki perizinan	5	50.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki perizinan	5	0	
2 7 3 2.0 3	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	<i>Kab. Rembang</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	5	50.000.000	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	<i>Kab. Rembang</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	5	0	
2 7 3 2.0 4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	5	50.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	5	0	
2 7 3 2.0 1	<i>Pelaksanaan Konsultasi</i>	<i>Kab. Rembang</i>	<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat</i>	5	50.000.000	<i>Pelaksanaan Konsultasi</i>	<i>Kab. Rembang</i>	<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat</i>	5	0	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			4	Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Rembang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5	0	Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Rembang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5	0	
2	7	3	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40	50.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40	0	
2	7	3	2.05	1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	0	
2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	61,40	160.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	61,40	649.600.000	
2	7	4	2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja Jumlah Layanan Antar Kerja di Daerah	110	70.000.000	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja Jumlah Layanan Antar Kerja di Daerah	110	631.000.000	
2	0	0	2.07	1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Rembang	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	3	15.000.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Rembang	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	3	350.000.000	
2	7	4	2.01	2 Pelayanan antar kerja	Kab. Rembang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20	15.000.000	Pelayanan antar kerja	Kab. Rembang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20	0	
2	0	0	2.07	3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30	15.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30	0	
2	0	0	2.07	4 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Katenagakerjaan	Kab. Rembang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15	15.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Katenagakerjaan	Kab. Rembang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15	131.000.000	
2	7	4	2.01	5 Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15	10.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15	150.000.000	
2	7	4	2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LPTKS	15	10.000.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LPTKS	15	0	
2	7	4	2.02	1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Kab. Rembang	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	5	5.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Kab. Rembang	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	5	0	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 7 4 2.0 2	Pengawasan dan Pengendalian	Kab.	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1	5.000.000	Pengawasan dan Pengendalian	Kab.	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1	0	2
2 7 4 2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	20	50.000.000,	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	20	18.600.000	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Rembang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	15.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Rembang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	0	
2 7 4 2.0 3	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Rembang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		15.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Rembang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		0	
2 7 4 2.0 3	Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1.500	20.000.000	Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1.500	18.600.000	
2 7 4 2.0 4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi	20	30.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi	20	0	
2 0 0 2.0 7 4 4 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia(PMI)/ Pekerja MigranIndonesia(PMI)	Kab. Rembang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi danDitingkatkanKompetensinya	20	30.000.000	Peningkatan Pelindungan danKompetensi Calon PekerjaMigran Indonesia(PMI)/ Pekerja MigranIndonesia(PMI)	Kab. Rembang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi danDitingkatkanKompetensinya	20	0	
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	39,50	250.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	39,50	475.000.000	
			Persentase perusahaan yang taat aturan	72,8				Persentase perusahaan yang taat aturan	72,8		
2 7 5 2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan	50	145.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan	50	325.000.000	
2 0 0 2.0 7 5 1 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Rembang	Jumlah Perusahaan yang MelaksanakanPengesahan Peraturan Perusahaan yang TerkaitdenganHubunganIndustrialdanTerdaf t ardiWLKPOonline	15	40.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Rembang	Jumlah Perusahaan yang MelaksanakanPengesahan Peraturan Perusahaan yang TerkaitdenganHubunganIndustrialdanTerdaf t ardiWLKPOonline	15	0	
2 7 5 2.0 1 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Rembang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	5.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Remban g	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20751	3	Kab. Rembang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	100.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Rembang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	225.000.000	
2752			Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan	50	105.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan	50	150.000.000	
20752	1	Kab. Rembang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50	40.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Rembang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50	150.000.000	
20752	2	Kab. Rembang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	6	10.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Rembang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	6	0	
2752	3	Kab. Rembang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10	10.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Rembang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10	0	
2752	4	Kab. Rembang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	25.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Rembang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	0	
2752	5	Kab. Rembang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16.000	20.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Rembang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16.000	0	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		900.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				494.800.000	
31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		900.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				494.800.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.1.2.0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Pertumbuhan usaha industri	4,1	800.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Pertumbuhan usaha industri	4,1	274.800.000	
3.3.1.2.0	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya	250	800.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya	250	274.800.000	
3.3.1.2.0.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	30.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	0	
3.3.1.2.0.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	125.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	50.000.000	
3.3.1.2.0.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	100.000.000	
3.3.1.2.0.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	12.400.000	
3.3.1.2.0.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	100.000.000	
3.3.1.2.0.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	20.000.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	12.400.000	
3.3.1.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		% usaha industri yang memiliki ijin usaha	30	40.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		% usaha industri yang memiliki ijin usaha	30	0	
3.3.1.3.2.0	Penerbitan Izin Usaha		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri	71	40.000.000	Penerbitan Izin Usaha		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri	71	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pening	
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1		Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		sesuai SOP			Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		sesuai SOP		
330203	330203	Kab. Rembang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	35	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	35	0		
33031	33031	Kab. Rembang	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	600	25.000.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Rembang	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	600	0		
331	331		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	4,2	60.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		% usaha industri yang masuk database	4,2	220.000.000		
331	331		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1	660.000.00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola Dengan Baik	1	220.000.00		
3314	3314	Kab. Rembang	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	20.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	220.000.000		

3	3	0	2.0	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1	10.000.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1	0
3	3	0	2.0	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	30.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	0

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara umum rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2026 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2026 namun pada tahap perencanaan di tahun 2026 ini dapat terjadi dinamika perubahan yang mungkin saja terjadi perubahan anggaran pada akhir tahun karena adanya penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas pada Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif dimana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya pertumbuhan industri dan penerapan inovasi teknologi industri yang berdaya saing
 - b. Kurangnya informasi perusahaan industri atas ketentuan industri
 - c. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah
 - d. Belum optimalnya sistem informasi (market place) ketenagakerjaan, serta masih rendahnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki
 - e. Belum optimalnya perusahaan yang taat peraturan dan masih kurangnya koordinasi lembaga kerja sama tripartit
2. Adanya Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan dapat tertuang di table 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Rembang Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Penempatan Tenaga Kerja		
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Antar Kerja di Daerah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		
	a) Pekerjaan Peningkatan kapasitas dan kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja	DINPERINAKER, Kab. Rembang		2 paket	
	b) Pekerjaan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa SMK, SMA dan atau MA	Kab. Rembang		1 paket	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		

	Pekerjaan Gerakan Satu Perusahaan Satu Persen Disabilitas	Kab. Rembang		1 paket	
	• Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		
	Pekerjaan Pelatihan wirausaha untuk perluasan kesempatan kerja	DINPERINAKER, Kab. Rembang		1 paket	
		DINPERINAKER, Kab. Rembang			
2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SEBAGAINYA		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan • Persentase Perusahaan yang Taat Aturan 		
	a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan		
	• Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		
	Pekerjaan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama				
	• Sub Kegiatan Penyelenggaraan		Jumlah Data dan Informasi		

	Pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosaial serta Pengupahan		Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
	1) Pekerjaan Sosialisasi tentang sarana hubungan industrial pada perusahaan	DINPERINAKER, Kab. Rembang		1 paket	
	2) Pekerjaan Pemantauan pengupahan, THR dan sosialisasi UMK pada perusahaan	Kab. Rembang		1 paket	
	3) Pekerjaan Pemantauan pengupahan, THR dan sosialisasi UMK pada perusahaan	Kab. Rembang		1 paket	
	4) Pekerjaan Pemantauan pengupahan, THR dan sosialisasi UMK pada perusahaan	DINPERINAKER, Kab. Rembang		1 paket	
	b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kab/Kota		Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan		
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah		

	Pekerjaan Peningkatan Kapasitas SDM Perusahaan dan Buruh	Kab. Rembang		1 paket	
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Pertumbuhan usaha industri		
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya		
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
	Pekerjaan Pendampingan Klaster Industri	Kab. Rembang		1 paket	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
	1) Pekerjaan Pelatihan bagi Industri Kecil dan Menengah	Kecamatan Sulang Kab. Rembang, Kab. Rembang		1 paket	
	2) Pekerjaan Penumbuhan Wirausaha Baru	Desa Karangharjo Kec. Sulang, Kab. Rembang		1 paket	

	<ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
	Pekerjaan Business Matching, Promosi dan Pemasaran Produk Industri	Kab. Rembang		1 paket	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase usaha industri yang masuk database		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Database Industri yang dikelola dengan baik		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi		

			Industri Nasional (SIINas)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HAKI bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) 	Kab. Rembang		1 paket	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pendampingan TKDN 	Kab. Rembang		2 paket	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Klinik SIINas 	Kab. Rembang		2 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2025-2030, Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis Kementerian Tenaga Kerja adalah sebagai Berikut:

1. Visi Kementerian Ketenagakerjaan Visi Kementerian Ketenagakerjaan adalah “Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan menuju Indonesia emas 2045”.
2. Misi Kementerian Ketenagakerjaan RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional Pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, yang terdiri dari:
 - (i) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),
 - (ii) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru,
 - (iii) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi,
 - (iv) memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas,
 - (v) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai

- tambah di dalam negeri,
- (vi) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,
 - (vii) memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan,
 - (viii) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3. Tujuan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan sebagai berikut:
- a) meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan adil serta memperkuat perlindungan, kesejahteraan dan produktivitas pekerja; dan
 - b) meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang berkualitas dan bermanfaat.
4. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
- a) Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan, dan
 - b) Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang

a. Tujuan

1. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja dan daya saing industri
Indikator Tujuan 1 : Tingkat pengangguran terbuka (%)
Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)

b. Sasaran

1. Terciptanya kepuasan pelayanan publik
Indikator sasaran: indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
Indikator sasaran: Persentase penempatan tenaga kerja
3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis

Indikator sasaran: Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial

4. Meningkatnya usaha industri

Indikator sasaran: Persentase pertumbuhan jumlah industri

5. Meningkatnya pengendalian dan sinformasi industri

Indikator sasaran1: Persentase tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Industri

Indikator sasaran 2 : Persentase peningkatan usaha industri berizin (%)

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025-2030 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin dan produktivitas industri pengolahan	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,58	2,53	2,48	2,43	2,38	2,34	2,3
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,5	75,05	75,6	76,16	76,73	77,29	77,86
			Peningkatan PDRB sektor industri	%	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
		1. Terciptanya Kepuasan Pelayanan Publik	(%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		97,39	97,39	97,39	97,39	97,39	97,39	97,39
		2. Meningkatnya Usaha Industri	(%) Pertumbuhan Jumlah industri	%	4	4,05	4,1	4,15	4,15	4,2	4,2
		3. Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan	(%) Penempatan tenaga kerja	%	83	83,1	83,2	83,4	83,6	83,8	84

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		4. Meningkatkan Pengendalian dan Informasi Industri	(%)Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Industri	%	20	25	30	35	40	45	50
			(%) Persentas peningkatan usaha indust berizin	%	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
		5. Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis	(%)Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100	100
		6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKI (nama opd)		82,56	83,69	84,11	84,53	84,95	85,38	85,8
			Indeks Kepuasan Masyarakat (nama opd)		72	73	73,45	74,18	74,92	75,67	76,43
			Indeks Manajemen Risiko (nama opd)		3,994	2,596	2,675	2,754	2,836	2,92	3,007

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

a. Sumber Daya Manusia.

perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

b. Data

kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan merupakan hal yang penting;

c. Dana

kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjangkaran aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;

d. Sarana

sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas

perencanaan

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2026, Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan:

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2025-2029 yang mendatang sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Rembang Sejahtera

Misi :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing ;
- b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan;
- c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional ;
- d. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan ;
- e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengikuti Misi Ke II dari Misi Kepala daerah Kabupaten Rembang yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan” berkaitan langsung dengan tugas dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang antara lain meliputi:

- Jumlah program 8 yaitu;

- a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja
- e. Program Hubungan Industrial
- f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Jumlah Kegiatan 16 dan jumlah sub Kegiatan 48 terdiri dari

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : 1. Nilai saki OPD

2. Nilai IKM OPD

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator: Persentase implementasi rencana tenaga kerja

Kegiatan: Penyusunan rencana tenaga kerja

- c) Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Indikator: % Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Kegiatan:

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

- d) Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator: Persentase Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan:

1. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
3. Perlindungan PMI di Daerah Kabupaten/Kota

e) Program Hubungan Industrial

Indikator: - Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-Persentase perusahaan yang taat aturan

Kegiatan:

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

f) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator: Pertumbuhan usaha industri

Kegiatan:

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

g) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Indikator: % usaha industri yang memiliki izin usaha

Kegiatan:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

h) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator: %usaha industri yang masuk database

Kegiatan:

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan jumlah program dan kegiatan yang ada maka kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026 sejumlah Rp 8,665,762,129,00 (Delapan Milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu serratus dua puluh Sembilan rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN REMBANG

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - a. Penyusunan rencana tenaga kerja
3. Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - c. Perlindungan PMI di Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Hubungan Industrial
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2026 adalah sejumlah 8 program yang terdiri dari 16 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				9.023.992.284	APBD	-		10.465.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.529.192.284				9.805.000.000
2	7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.529.192.284				2.305.000.000
2	7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah		100%	7.337.592.284,			100 %	7.500.000.000
2	7 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah		100	97.500.000			92	9.500.000
2	7 1 2.01 1 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		2	70.000.000			3	1.000.000
2	7 1 2.01 2 <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		2	5.000.000			2	1.000.000
2	7 1 2.01 3 <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubaha RKA- SKPD</i>		2	5.000.000			2	1.000.000
2	7 1 2.01 6 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>		3	5.000.000			3	1.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		<i>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>							
2	7	1	2.01	7	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5	12.500.000	3	1.000.000
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100	6.843.242.284	100	7.087.221.848
2	7	1	2.02	1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	65	6.725.292.284	65	6.985.221.848
2	7	1	2.02	3	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12	115.950.000	12	100.000000
2	7	1	2.02	5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	1.000.000	1	1.000.000
2	7	1	2.02	7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	12	1.000.000	12	1.000.000
2	7	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	100	1.500.000	100	2.000.000
2	7	1	2.03	1	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1	0	1	1.0000.000
2	7	1	2.03	6	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1	1.500.000	6	1.000.000
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100	7.000.000	100	8.000.000
2	7	1	2.05	1	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	1	2.000.000	1	2.000.000
2	7	1	2.05	3	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1	2.000.000	1	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
2	7	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		1	2.000.000			1	1.000.000
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		2	1.000.000			5	2.000.000
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum		100	166.550.000,			100	87.078.152
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang Disediakan		12	6.284.000,			12	5.078.152
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		12	49.280.000			12	8.000.000
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan		12	10.000.000			12	5.000.000
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12	11.486.000			12	10.000.000
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12	10.000.000			12	12.000.000
2	7	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12	2.000.000			12	2.000.000
2	7	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		12	16.500.000			12	15.000.000
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	60.000.000			12	30.000.000
2	7	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		1	1.000.000			1	2.000.000
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur		95	50.000.000			95	146.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Urusan Pemerintah Daerah										
2	7	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			0	0	5	125.000.000
2	7	1	2.07	5 Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			1	10.000.000	0	0
2	7	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan			5	40.000.000	13	20.000.000
2	7	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100	126.800.000	100	113.700.000
2	7	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12	1.500.000	12	1.500.000
2	7	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12	117.300.000	12	111.000.000
2	7	1	2.08	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	8.000.000	12	1.200.000
2	7	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	0	12	0
2	7	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara dengan baik			100	45.000.000,	100	46.000.000
2	7	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			15	15.000.000	15	8.000.000
2	7	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			15	15.000.000	15	8.000.000
2	7	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas			1	15.000.000	1	20.000.000
2	7	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung			0	0	5	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>prasarana pendukung gedung kantor/Bangunan Lainnya</i>	<i>gedung kantor/Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>							
2 7 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase implementasi rencana tenaga kerja		60,50	5.000.000			63,75	80.000.000
2 7 2 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja		1	5.000.000			1	80.000.000
2 7 2 2.01 1	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		<i>1</i>	<i>2.500.000</i>			1	0
2 7 2 2.01 2	<i>Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</i>	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		2	2.500.000			40	80.000.000
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		0,77	62.000.000			0,87	750.000.000
2 7 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang kompeten		0,77	62.000.000			0,87	485.000.000
2 7 3 2.01 1	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>		0	0			<i>128 orang</i>	<i>400.000.000</i>
2 7 3 2.01 4	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi</i>	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		0	0			1	50.000.000
2 7 3 2.01 5	<i>Pengadaan Sarana Pelatihan vokasi dan produktifitas</i>	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		0	0			1	20.000.000
2 7 3 2.01 6	<i>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas</i>	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		0	0			1	5.000.000
2 7 3 2.02	Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	umlah Lembaga Ketenagakerjaan yang memenuhi		<i>10</i>	<i>62.000.000</i>			12	65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		syarat operasional							
2	7 3 2.02	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	-			20 lembaga	65.000.000
2	7 3 2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	5 lembaga	-			10	50.000.000
2	7 3 2.03	1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5	-			5	50.000.000
2	7 3 2.04	Konsultasi produktifitas pada Perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	1	-			1	100.000.000
2	7 3 2.04	1 Pelaksanaan konsultasi produktifitas kepada Perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas	5	-			10	100.000.000
2	7 3 2.05	Pengukuran produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktifitas tenaga kerja	42,815	0			42,951	50.000.000
2	7 3 2.05	1 Pengukuran kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktifitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	1	0			1	50.000.000
2	7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	61,40	649.600.000,			61,80	1.000.000.000
2	7 4 2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan antar kerja di Daerah	7.000	631.000.000			7.000	700.000.000
2	7 4 2.01	1 <i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	8	0			12	100.000.000
2	7 4 2.01	2 <i>Pelayanan antar kerja</i>	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	0	0			2.000	170.000.000
2	7 4 2.01	3 <i>Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja</i>	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan	5.000	131.000.000			5.000	130.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
		dan bimbingan jabatan											
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		50	150.000.000			50	200.000.00
2	7	4	2.01	5	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		50	0			50	100.000.000
2	7	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LPTKS		1	0			1	15.000.000
2	7	4	2.02	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi		1	0			1	5.000.000
2	7	4	2.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		1	0			1	10.000.000
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah layanan Informasi Pasar Kerja		3	18.600.000,			3	160.000.000
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		40	0			25	30.000.000
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1.000	0			1.0000	30.000.000
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		500	18.600.000,			750	40.000.000
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi		100	0			125	145.000.000
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		25	0			25	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	7	4	2.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		100	0		125	25.000.000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) - Persentase perusahaan yang taat aturan		18,55	475.000.000		19,10 73,40	475.000.000
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan		50	325.000.000		19	215.000.000
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		12	0		13	30.000.000
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		1	100.000.000		1	85.000.000
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		2	225.000.000		2	100.000.000
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan		50	150.000.000		50	260.000.000
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		50	150.000.000		50	130.000.000
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		4	0		3	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		10	0		15	30.000.000
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1	0		1	50.000.000
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		29.400	0		29.600	25.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				494.800.000			660.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				494.800.000			660.000.000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan usaha industri		4,1	274.800.000		4,15	150.000.000
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya		250	274.800.000		250	150.500.000
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1	0		1	30.000.000
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1	50.000.000 0		1	20.000.000
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1	100.000.000		1	36.000.000
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan		1	12.400.000		1	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	<i>Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>							
3 31 2 2.01 5	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>		1	100.000.000			1	25.000.000
3 31 2 201 6	<i>Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>		1	12.400.000			1	5.000.000
3 31 2 201 7	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		1	0			1	7.000.000
3 31 2 201 8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		1	0			1	10.000.000
3 31 2 201 9	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industry		1	0			1	5.000.000
3 31 2 201 10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		1	0			1	5.000.000
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase usaha industri yang memiliki ijin usaha		30	70.000.000			35	3000.000.000
3 31 3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Sesuai SOP		1	0,00			1	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 31 3 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1	0,00			1	150.000.000
3 31 3 2.01 4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1	0,00			1	150.000.000
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase usaha industri yang masuk database		4,2	220.000.000			4,3	210.000.000
3 31 4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Database Industri yang dikelola dengan baik		1	220.000.00			1	210.000.000
3 31 4 2.01 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	220.000.000			1	60.000.000
3 31 4 2.01 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		1 Dokumen	0,00			1	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 31 4 2.01 3	<i>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		<i>1 Dokumen</i>	<i>0,00</i>			<i>1</i>	<i>75.000.000</i>

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen rancangan akhir dalam melakukan perencanaan pengendalian evaluasi program-program dan sasaran maupun prioritas yang akan di laksanakan setiap Tahun. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renja tahun 2026 yaitu terkait pembiayaan yang masih kurang, yang akan berpengaruh dengan pencapain target akhir tahun 2026. Sarana prasarana yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum cukup memadai

Adapun upaya untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan pelayanan perlu adanya pelaksanaan evaluasi pada Tahun sebelumnya dan di tunjang dengan melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan.

Rencanan Kerja (RENJA) Tahun 2026 dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, responsif, efisien dan efektif dimana masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, selanjutnya dapat melakukan antisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah melalui cara atau proses yang paling optimal.

Rembang, 30 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG



Drs. DWI MARTOPO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670313 199401 1 001